

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

The Effect of Performance Based Finances Implementation on Performance Accountability of Government Organization (Survey on SKPD Kabupaten Bandung Barat Government)

Nana Marliyana

Program Studi D-4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: nana.marliyana.amp17@polban.ac.id

Jouzar Farouq Ishak

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: jouzar.farouq@polban.ac.id

Hastuti

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: hastuti@polban.ac.id

Abstract: *Performance Responsibility of Government Corporation is essential because it's stated in legal basis or organizational rules, which are required to fulfill their organizational accountability with the performance stipulated in the performance-based budget. This study points to decide the impact of actualizing performance-based financial by focusing on transparency and accountability on the performance accountability of government agencies in West Bandung Regency SKPD. This study uses quantitative studies methods with a survey technique. The sample used in observe were 28 Regional Work Units (SKPD) in West Bandung Regency. The quantity of respondents in this observe were 53 people. In this observe, Microsoft Excel and SPSS were assisted to analyze the data. The information analysis method used on this studies is multiple linear regression. Based on the check, it is known that transparency and responsibility impact the execution responsibility of government offices in West Bandung Regency, with a large effect of 68.1%.*

Keywords: *Transparency, Accountability, Accountability of Performance Government Agencies.*

1. Pendahuluan

Penetapan UU No. 23[20] dan No. 33 Tahun 2014[19] ditetapkannya pemda diharuskan untuk memenuhi akuntabilitasnya tidak terlepas dari anggaran pemerintah daerah. Penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran di setiap instansi pemerintah diatur oleh UU No 17 Tahun 2003[18] didukung Permendagri No 59 Tahun 2007[17] membahas mengenai penyusunan RKA-SKPD yang artinya sudah terpenuhinya kebutuhan aturan anggaran berbasis kinerja (ABK) serta akuntabilitas. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik hampir terjadi disemua pemerintahan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dalam mengamankan pelaksanaan program kegiatan dengan laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

Saat ini masyarakat menuntut akan kinerja pemerintah termasuk di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang telah menerapkan ABK pada penyusunan anggarannya diharapkan dapat tepat sasaran. Namun masih terdapat permasalahan yaitu dana yang dikelola belum secara optimal dalam penggunaan anggaran tersebut.

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat yaitu berdasarkan

realisasi anggaran belanja tahun 2018 dan 2019 untuk membiayai kegiatan mengalami peningkatan, akan tetap dalam capaian kinerja belum mencapai target yaitu 100% disebabkan masih lemahnya prinsip anggaran yang belum berjalan dengan baik, selain itu pada tahun 2019 sesuai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) KBB mendapat nilai B yang diberikan oleh (Men PANRB) dengan nilai tersebut artinya baik dan masih perlu perbaikan, selanjutnya Kepala Biro Investigasi mengkritisi kinerja pegawai yang belum maksimal dalam menjalankan visi misi pemerintahan KBB.

Berdasarkan fenomena disimpulkan bahwa suatu kinerja pemerintah KBB belum optimal dalam hal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan dalam ABK terlihat dari evaluasi penilaian mendapat nilai B menunjukkan masih kurangnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Anggraeni (2020)[8] dan Sefriyana (2014)[11] dimana masih terdapat perbedaan hasil dari sub variabel penerapan anggaran berbasis kinerja. berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti tertarik mengenai penerapan penganggaran pendekatan kinerja fokus pada transparansi dan akuntabilitas anggaran terhadap AKIP sebab ditemukan perbandingan hasil penelitian.

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap AKIP KBB, bagaimana peneruh transparansi terhadap AKIP KBB, dan bagaimana pengaruh AKIP KBB. Penulis membatasi penelitian dengan berfokus pada prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran yang dikaitkan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah KBB.

2. Kajian Pustaka

2.1 Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Halim(2014:177)[1] mengemukakan yaitu: “anggaran berbasis kinerja metode untuk manajemen dalam mengaitkan pendanaan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran serta pencapaian hasil yang dituangkan dalam target kinerja setiap unit kinerja”.Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja, Halim (2014:178)[1] prinsip-prinsip ABK ialah transparansi serta akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi serta efektivitas anggaran, serta disusun dengan pendekatan kinerja.

2.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Ketetapan Kepala LAN Nomor 239-IX-6-8-2003 mengenai Pedoman Penataan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah menjelaskan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah sebagai kewajiban suatu lembaga pemerintah dalam mengamanahkan kesuksesan dan kegagalan dalam mencapai sasaran yang sudah diresmikan melalui pertanggungjawaba secara periodik. Terdapat beberapa aspek untuk memenuhi akuntabilitas kinerja, menurut Ellwod dalam Mahmudi (2011:19)[4] aspek tersebut terdiri dari akuntabilitas hukum serta kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas strategi, dan akuntabilitas financial.

2.3 Hubungan Transparansi, Akuntabilitas, serta Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Terkait dengan transparan serta akuntabilitas berkaitan dengan kinerja lembaga publik dalam penerapan aturan perundang-undangan terkait implementasi prinsip transparans dan akuntabilitas pada pengendalian keuangan yang diharapkan tercapai pengelolaan pemda yang baik dan berpihak pada rakyat dan meningkatkan kinerja pemda (umar 2018)[12].

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Umar (2018)[12] adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas pada penataan finansial daerah dapat meningkatkan kinerja instansi, diharapkan mewujudkan pengelolaan pemda yang baik dan kinerja instansi pemerintah. Halim (2014:178)[1] mengatakan bahwa ABK dapat diukur dengan transparansi dan akuntabilitas anggaran, selain itu penerapan anggaran dengan pendekatan kinerja mendukung suatu akuntabilitas pada lembaga publik diatur oleh Perpres No. 29/2014[14] perihal SAKIP dalam sektor publik harus memenuhi aspek akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anggaraeni (2020)[8], Umar (2018)[12], Nasution (2018)[10] membuktikan berpengaruhnya antara penerapan ABK yaitu transparansi dan akuntabilitas terhadap akuntabilitas kinerja instansi.

Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: “Transparansi dan Akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap AKIP KBB.”

3. Metode Penelitian

Teknik yang dipergunakan dalam penelitian yaitu kuantitatif. Populasi penelitian yang dipakai yaitu 45 SKPD KBB dengan pengambilan sampel purposive sampling. Sampel diseleksi dengan patokan yang ditentukan sebanyak 28 SKPD dengan status dinas serta kantor sebagai bagian pelaksanaan dan penunjang pekerjaan pemerintahan. Jenis informasi dalam penelitian berupa data secara langsung diberikan kepada responden. Sumber informasi berupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan informasi dengan cara survey melalui penyebaran kuesioner diutamakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Analisis data yang digunakan berupa uji regresi linier berganda dengan menggunakan *Microsoft Excel* dan *Software IBM SPSS*. Uji kualitas kuesioner dengan analisis deskriptif, pengujian validitas, serta reliabilitas, pengujian asumsi klasik, uji regresi linier berganda. Selanjutnya uji statistik F, uji statistik t, dan analisis koefisien determinasi (R^2).

4. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini informasi yang digunakan data primer yaitu kuesioner disebarkan ke 28 SKPD KBB. Sebanyak 56 kuesioner tersebar tiap SKPD menerima 2 kuesioner diutamakan bagian keuangan dan bidang anggaran. Dari keseluruhan kuesioner yang disebarkan hanya 3 kuesioner tidak dikembalikan oleh responden dikarenakan pandemic.

Analisis Deskriptif

Hasil dari analisis deskriptif ini didapat dengan menghitung tanggapan responden dihitung dari skor setiap pernyataan. Tabel rentang klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1 – Rentang Klasifikasi

No	Rentang Klasifikasi	Kriteria
1	53 – 95,4	Tidak Baik
2	95,5 – 137,8	Kurang Baik
3	137,9 – 180,3	Cukup Baik
4	180,4 – 222,6	Baik
5	222,7 - 265	Sangat Baik

Sumber: diolah peneliti

Selanjutnya dikelompokkan dengan rentang klasifikasi, untuk variabel transparansi terlihat pada

tabel sebagai berikut:

Tabel 2- Hasil pengelolaan klasifikasi atas transparansi

Variabel	Skor Maks	Skor Min
Transparansi	219	176
Total skor penilaian var transparansi		196,5
Kategori tanggapan responden pada var transparansi pemerintah KBB adalah BAIK		

Sumber: diolah peneliti

Untuk variabel akuntabilitas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 – Hasil pengelolaan klasifikasi atas akuntabilitas

Variabel	Skor Maks	Skor Min
Akuntabilitas	217	182
Total skor penilaian var akuntabilitas		199,75
Kategori tanggapan responden pada var akuntabilitas pemerintah KBB adalah BAIK		

Sumber: diolah peneliti

Sementara itu hasil kategori atas AKIP terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4 – Hasil pengelolaan klasifikasi atas variabel AKIP

Variabel	Nilai Maks	Nilai Min
AKIP	216,5	207
Total skor penilaian AKIP		212,4
Kategori tanggapan responden pada AKIP KBB adalah BAIK		

Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa skor untuk keseluruhan variabel masuk kategori baik, menunjukkan bahwa pendekatan basis kinerja dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pemda KBB sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu peningkatan agar lebih optimah.

Sementara itu untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dengan skor 212,4 masuk kategori baik, menunjukkan bahwa akuntabilitas pada pemda KBB sudah terlaksana sesuai dengan seharusnya, agar lebih maksimal maka perlu ditingkatkan.

Uji Instrumen

pengujian validitas, signifikansi = 0,05 dengan nilai r_{tab} sebesar 0,271 dan r_{hit} seluruh item pernyataan lebih besar dari r_{tab} , artinya semua item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. pengujian reabilitas, dengan *Cronbach's alpha* untuk variabel transparansi adalah 0,894, variabel akuntabilitas adalah 0,817 dan variabel AKIP adalah 0,972. Berdasarkan perhitungan membuktikan bahwa reliabel jika hasil *Cronbach's alpha* > 0,7, maka dapat diketahui secara keseluruhan pernyataan kuesioner dikatakan handal.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas, nilai *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan pendekatan *Exact* menghasilkan nilai

0,300, nilai itu lebih besar dari signifikan 0,05 dapat dikatakan data terdistribusi secara normal. Pengujian multikolinearitas, nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10 yaitu 1,103, membuktikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dan didukung oleh nilai tolerace lebih dari 0,10 adalah sebesar 0,907. Pengujian heterokedastisitas, pada grafik *scatterplot* tidak terdapat pola dengan jelas dan titik-titik di atas dan di bawah angka 0 dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas didalam penelitian.

Uji Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis, dan Koefisiensi Determinasi

Adapun hasil analisis regresi menggunakan *Software IBM* berikut ini:

Tabel 5 – Uji Regresi Linier Berganda

No	Variabel/Konstansta	P-Value	t _{hit} (sig)	t _{tabel}	F _{hit}	F _{tabel}
1	Transparansi	0,85	1,804 (0,077)	1,678	56,617	2,798
2	Akuntabilitas	2,088	9,438 (0,000)			
3	Konstanta (a)	8,877				
4	Koefisiensi determinasi (R ²)	0,681				

Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan tabel tersebut didapat persamaan regresi linier berikut ini:

$$Y = 8,877 + 0,085X_1 + 2,088X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan tersebut diuraikan dengan penjelasan berikut:

1. Koefiesin regresi transparansi menunjukkan angka 0,085 menunjukkan setiap kenaikan sebesar 1 maka variabel AKIP akan meningkat 0,085.
2. Koefisiensi regresi akuntabilitas menunjukkan angka 2,088 menunjukkan tiap meningkat sebesar 1 maka AKIP meningkat 2,088.
3. Konstanta sebesar 8,877 menunjukkan jika nilai nol, maka nilai konsisten variabel dependen 8,877.
4. R square (R²) diperoleh sebesar 0,681 menunjukkan nilai koefisien determnasi sebesar 68,1% menunjukkan bahwa AKIP dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas sebesar 68,1% sedangkan 31,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel 5 diatas diketahui bahwa t_{tabel} signifikansi 0,05 df(n-1-5) = 53-1-5 = 47 diperoleh sebesar 1,678. Dalam pengolahan data diperoleh nilai t_{hitung} variabel transparansi terhadap AKIP sebesar 1,804 dengan sig 0,077 dan variabel akuntabilitas terhadap AKIP sebesar 9,438 dengan sig 0,000 lebih besar dari t_{tabel}. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh namun tidak signifikan, sedangkan akuntabilitas berpengaruh signifikan maka hanya H_{a2} yang hipotesisnya dapat diterima.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan variabel transparansi berpengaruh tidak signifikan terhadap AKIP dengan hasil koefisien regresi senilai 0,085. Hasil tersebut terjadi karena masih adanya responden dalam indikator yang menyatakan netral, sehingga ditemukan pengaruh antara transparansi dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah namun tidak signifikan. Terdapat perbedaan dengan penelitian Nasution (2018)[10] yaitu secara parsial transparansi berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap kinerja pemda.

Hasil penelitian variabel akuntabilitas menunjukkan pengaruh dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai koefisien regresi sebesar 2,088 maka secara relatif akuntabilitas dapat meningkatkan AKIP. Penelitian ini sejalan dengan Nasution (2018)[10] dan Umar (2018)[12] bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja lembaga.

Terkait hasil analisis dan uji hipotesis dapat diketahui dari ketiga variabel yang diteliti keseluruhan variabel telah dilaksanakan dengan baik karena termasuk kategori baik, menunjukkan variabel independen memiliki pengaruh terhadap AKIP sebesar 68,1%, pengaruhnya termasuk memiliki hubungan yang tinggi dan 31,9% pengaruh yang disebabkan oleh variabel lain tidak terdapat dalam penelitian ini.

Keadaan ini searah dengan fenomena yang menyebutkan hasil evaluasi penilaian SAKIP di KBB mendapat nilai B yang menunjukkan masih perlu meningkatkan pelayanan publik. Dalam organisasi kantor publik wajib untuk memenuhi aspek akuntabilitas kinerja yang memiliki pengaruh terhadap suatu anggaran berbasis kinerja dalam mengimplementasikannya harus mematuhi aspek akuntabilitas terkait sehingga instansi pemerintah menghasilkan kinerja secara optimal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hasil ini juga sejalan dengan Nasution (2018)[10] terkait akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh secara simultan pada kinerja pemerintah, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Umar (2018)[12] memberikan kesimpulan transparansi serta akuntabilitas bersama-sama memiliki pengaruh pada kinerja instansi, untuk meningkatkan kinerja instansi maka diupayakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengendalian keuangan yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

5. Kesimpulan

Dari hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap AKIP di Kabupaten Bandung Barat, dengan pengaruh sebesar 68,1% dan 31,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Transparansi berpengaruh pada AKIP di KBB, dengan nilai koefisien regresi 0,85. Akuntabilitas mempunyai pengaruh pada AKIP di KBB, nilai koefisien regresi sebesar 2,088.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik. In *problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*.
- [2] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [3] Krina, L. L. (2003). *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [4] Mahmudi. (2011). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UII Press.
- [5] Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta: Andi*.
- [6] Nuryaman dan Veronica. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [7] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. In *Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet*.
- [8] Anggraeni, F. (2020). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung) The Influence of Performance Based Budget Implementation on Performance Accountability of Government . 1(1), 36–44.*

- [9] Hidayah, S. (2012). Pengetahuan Anggaran, Efektivitas Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Hubungannya dengan Kepuasan Atas Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Borneo Administrator*.
- [10] Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*.
- [11] Sefriyana, M. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Kota Bengkulu*.
- [12] Umar, Z. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh*.
- [13] Fajar, widhi mochamad. (2016). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung)*.
<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7525>
- [14] Sinaga, L. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Batu Bara*.
- [15] Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jakarta. (2003). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- [16] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 6(10), 1–11.
- [17] Permendagri No.59 Tahun 2007. (n.d.). *Permendagri No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [18] Undang-Undang No 17 Tahun 2003. (n.d.). *Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Dpr.
- [19] Undang-Undang No 33 Tahun 2004. (n.d.). *Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Dpr.
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Kementerian Sekretariat Negara RI. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- [21] BandungKita.id. (n.d.). *SAKIP Kabupaten Bandung Barat Bertahan di Nilai B, Aa Umbara : Kinerja Meningkatkan Secara Nilai, Namun Secara Kriteria Masih B*. <https://bandungkita.id/2019/01/30/sakip-kabupaten-bandung-barat-bertahan-di-nilai-b-aa-umbara-kinerja-meningkat-secara-nilai-namun-secara-kriteria-masih-b/> (diakses pada 22 Jan 2021)
- [22] Eporja.bandungbaratkab.go.id. (n.d.). *Daftar SKPD Kabupaten Bandung Barat*. <http://eporja.bandungbaratkab.go.id/portal/home> (diakses pada 20 Feb 2021)
- [23] Pasundanekspres.co. (n.d.). *Jachja: Kinerja ASN Kabupaten Bandung Barat Membre*. <https://www.pasundanekspres.co/jabar/bandung/jachja-kinerja-asn-kabupaten-bandung-barat-membre/> (diakses pada 22 Jan 2021)
- [24] Kabupaten Bandung Barat. (n.d.). *Laporan Realisasi Anggaran KBB 2019*.
- [25] Kabupaten Bandung Barat. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran KBB 2018*.